

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Koperasi tampaknya bukanlah istilah yang sering asing bagi masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya koperasi telah menjadi salah satu wadah demokrasi ekonomi nasional yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, disamping dunia usaha lainnya yaitu usaha swasta dan usaha Negara. Selain itu, koperasi dinyatakan sebagai suatu entitas ekonomi yaitu sebagai suatu usaha organisasi ekonomi rakyat dan juga badan usaha sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Koperasi Indonesia sebagai organisasi ekonomi rakyat berwatak social, memiliki tujuan untuk mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Manfaat yang diterima anggota harus lebih diutamakan daripada laba karena koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal. Dan koperasi harus benar-benar mengabdikan diri kepada kemanusiaan dan bukan kepada kebendaan semata-mata. Namun demikian, kondisi seperti ini tidaklah menjadikan koperasi sebagai satuan usaha yang tertinggal dari satuan usaha lainnya.

Koperasi bekerja sama, bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, kewajiban, dan hak. Dengan demikian adalah wajar jika koperasi disebut sebagai wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Karena dasar demokrasi ini maka haruslah selalu dijaga dan diperhatikan, bahwa koperasi adalah milik para anggotanya

sendiri. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta di manfaatkan sendiri oleh anggotanya. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi didalam koperasi ada pada rapat anggota.

Sebagai suatu entitas ekonomi, koperasi diharapkan dapat terus berkembang dan para pengurusnya dapat lebih bersikap profesional. Hal ini dapat dinyatakan dalam bentuk penyajian secara wajar atas informasi keuangan, yang kemudian akan bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam mengambil keputusan. Sesuai dengan landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi (Kurniawan IGH, 2013)

Pernyataan Standar akuntansi keuangan Nomor 27 (PSAK 27) tentang Akuntansi Koperasi mewajibkan pengurus koperasi untuk melaporkan segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi, termasuk didalamnya aspek keuangan, kepada rapat anggota. Dalam hal ini, pengurus koperasi wajib membuat laporan keuangan sebagai bagian laporan pertanggung jawaban pengurus.

PSAK Nomor 27 juga memberikan arahan/pedoman bagi koperasi dalam menyajikan informasi keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini menggunakan Undang-undang No. 12/1967 sebagai pedoman dan karena adanya perubahan undang-undang No. 12/19967 menjadi Undang-undang No. 25 /1992, PSAK Nomor 27 direvisi menjadi Nomor PSAK 27 (revisi 1998). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 Revisi ini disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akutan Indonesia pada tanggal 4 September 1998 dan berlaku efektif untuk laporan keuangan koperasi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1999.

Dalam penelitian nanti, Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Kantor Cabang Tangerang digunakan sebagai obyek pembahasan. Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Kantor Cabang Tangerang ini merupakan koperasi yang berkembang dan koperasi tersebut telah melakukan banyak jenis usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yang merupakan para pegawai dari PT. PLN (Persero) Kantor Cabang Tangerang. Koperasi pegawai ini juga berusaha menyajikan informasi keuangan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan penjelasan yang diperlukan seperti diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dasar penyajian informasi keuangan yang disajikan, penulis akan menilai sejauh mana PSAK 27 dan PSAK 27 (Revisi 1998) diterapkan pada Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Kantor Cabang Tangerang.

Dengan demikian penulis memutuskan judul skripsi ini adalah **“PERBANDINGAN PENERAPAN PSAK NOMOR 27 DAN PSAK NOMOR 27 (REVISI 1998) DAN DAMPAKNYA ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI PEGAWAI PT. PLN (PERSERO) KANTOR CABANG TANGERANG ”**.

## **B. Identifikasi Pembatasan Masalah**

Masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

### **1. Identifikasi Masalah**

Untuk memfokuskan pembahasan, penulisan skripsi ini diidentifikasi pada topik pendapatan, beban dan manfaat yang dikaitkan dengan pendapatan dan beban tersebut, serta ekuitas. Masalah-masalah tersebut dihubungkan dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi yaitu PSAK Nomor 27 dan PSAK Nomor 27 (Revisi 1998).

## 2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah mengenai Penerapan PSAK Nomor 27 dan PSAK Nomor 27 (Revisi 1998) Atas pembatasan ruang lingkup tersebut, penulis menggunakan laporan keuangan Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Kantor Cabang Tangerang tahun buku 2008 dan 2009 atas laporan keuangan maka penulis membatasi masalah pada perbandingan Penerapan PSAK Nomor 27 dan PSAK Nomor 27 (Revisi 1998) tersebut.

## C. Perumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana penerapan PSAK Nomor 27 dan PSAK Nomor 27 (Revisi 1998) pada Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Kantor Cabang Tangerang?
2. Apa pengaruh atau dampak penerapan PSAK Nomor 27 dan PSAK Nomor 27 (Revisi 1998) terhadap laporan keuangan?

#### **D. Tujuan Peneliti**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk meneliti dan mengetahui penerapan PSAK Nomor 27 dan PSAK Nomor 27 (Revisi 1998) pada Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Kantor Cabang Tangerang.
2. Untuk dapat mengetahui pengaruh penerapan PSAK Nomor 27 dan PSAK Nomor 27 (Revisi 1998) terhadap laporan keuangan.

#### **E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Disamping manfaat atau kegunaan tersebut, hasil penelitian juga dapat berguna untuk:

1. Bagi Penulis sendiri agar dapat membandingkan antara teori yang diperoleh dari pendidikan akademi atau literatur lainnya dengan kenyataan yang ada dalam praktek Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Kantor Cabang Tangerang.
2. Bagi pembaca, sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang ingin memperoleh gambaran tentang perbandingan penerapan PSAK No.27 dan PSAK No. 27 dan dampaknya atas laporan keuangan pada Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Kantor Cabang Tangerang.
3. Bagi Koperasi Pegawai PT. PLN (Persero) Kantor Cabang Tangerang:  
Memberi masukan mengenai masalah-masalah yang menyangkut akuntansi perkoperasian. Hasil penelitian ini diharapkan juga berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pihak-pihak

yang terkait dalam Koperasi Pegawai PT.PLN (Persero) Kantor Cabang Tangerang.

## **F. Sistematis Penyusunan Skripsi**

Untuk menjaga keterkaitan antara satu bab dengan bab lain dan untuk memudahkan pemahaman maka penulis skripsi ini diorganisasikan kedalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, identifikasi pembatasan masalah, perumusan masala, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi

### **BAB II            LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi permasalahan yang akan dibahas, yang bersumber dari literatur-literatur dan sumber bacaan lain yang terkait.

### **BAB III           METODOLOGI PENELITIAN**

Mengenai metode penelitia yang penulis pakai dalam penyusunan skripsi ini, yaitu mengenai tempat dan waktu penulis melakukan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan definisi operasioanl variabel.

**BAB IV            GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Menguraikan tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, struktur organisasi perusahaan, kegiatan-kegiatan usaha perusahaan.

**BAB V            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan hasil perbandingan yang dilakukan terhadap penerapan PSAK Nomor 27 dan PSAK Nomor 27 (Revisi 1998) pada Koperasi Pegawai PT.PLN (Persero) Kantor Cabang Tangerang.

**BAB VI            KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang terkandung dalam skripsi ini serta saran-saran yang sekiranya dapat berguna bagi koperasi yang diteliti.